

PERS DAN KOMUNITAS PEMBACA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Keberadaan media massa tidak terlepas dari kualitas masyarakat yang melingkupinya. Kualitas macam apa yang dapat mendukung media massa? Khusus untuk media pers (*print media*), biasanya dikaitkan dengan minat baca masyarakat. Minat baca ini, jangan dilihat hanya dorongan psikologis. Jika harus dibicarakan sedikit serius, dapat dikaji sebagai kecenderungan sosio-kultural suatu masyarakat, dengan melihat kebiasaan dan pola-pola penggunaan media massa, khususnya media cetak.

Di lingkungan masyarakat manapun adanya, media massa merupakan yang paling rendah penggunaannya di antara jenis-jenis komunikasi yang dijalankan anggota masyarakat. Meskipun cakupan distribusinya lebih luas, tetapi frekuensi penggunaannya kalah banyak dibandingkan dengan media sosial seperti komunikasi kelompok dan antar perorangan. Artinya proses komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat sesungguhnya didominasi oleh komunikasi yang tidak menggunakan media massa. Setidaknya kalau dibuat peringkat proses komunikasi bagi seseorang berturut-turut adalah komunikasi intra-pribadi, antar-pribadi, intra-kelompok, antar-kelompok, institusi, dan terakhir media massa. Media massa khususnya media pers/jurnalisme berfungsi bagi person pada tataran institusional, yaitu dalam keberadaannya sebagai bagian (warga) dari suatu institusi sosial (politik, ekonomi dan kultural).

(2)

Dalam menjalankan fungsinya untuk menyediakan informasi bagi person-person yang berada dalam berbagai institusi sosial, media massa hadir sebagai institusi sosial, dilekat dengan fungsi yang harus dijalankannya dalam sistem sosial. Keberadaan dalam sistem sosial ini melahirkan pengelola media sebagai aktor sosial yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan harapan (*expectation*) dari masyarakat. Harapan inilah yang menjadi pendorong dalam menformat fungsi yang harus dijalankan oleh media massa sebagai institusi sosial. Ia dapat berupa dorongan psikologis, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dorongan sosiologis. Jika dorongan pertama membawa seseorang ke dunia dalam (*inner world*) yang bersifat subyektif, maka dorongan kedua membawa seseorang ke dunia luar yang bersifat empiris obyektif. Media massa akan mensuplai masyarakatnya untuk dapat memasuki dunia yang dipilihnya. Materi informasi fikisional semacam musik akan membawa penggunanya ke dunia subyektif, sedang materi faktual seperti berita (*news*) digunakan sebagai dasar memasuki dunia sosial empiris.

(3)

Pilihan seseorang akan informasi ditentukan oleh posisinya dalam sistem sosial. Informasi selamanya memiliki fungsi pragmatis bagi penggunanya. Seseorang yang memiliki peran dalam sistem sosial, secara hipotetis dapat dibayangkan akan lebih memerlukan materi informasi faktual. Karena dengan informasi faktual ini dia

* Disampaikan pada Seminar Mendorong Pengekspresian Diri Berbagai Kelompok Masyarakat/Suku Bangsa Melalui Penerbitan Buku dan Pers, Panitia Pameran Buku Indonesia '99, Jakarta 14 September 1999

menempatkan dirinya dalam interaksi sosial. Sebaliknya, semakin tidak berperan seseorang dalam kehidupan sosial, dengan sendirinya relatif dia tidak memerlukan informasi faktual. Ini kiranya dapat menjelaskan mengapa informasi hiburan lebih banyak peminatnya. Sebab struktur masyarakat bersifat elitis dalam peran sosial. Dengan kata lain, elit sosial adalah person yang memiliki peran dalam kehidupan sosial dalam skala tertentu. Skala lingkup kehidupan sosial dengan peran seseorang di dalamnya akan menentukan tipe informasi yang relevan baginya.

Dorongan seseorang akan informasi bisa juga karena pembiasaan (*conditioning*) dari dinamika sosial di luar dirinya. Jika bertahun-tahun hanya memperoleh tipe informasi tertentu, maka kebutuhannya akan informasi akan terformat, seolah-olah hanya seperti yang biasa diterimanya. Atau peran sosial seseorang dapat dijalankan tanpa landasan dunia empiris obyektif. Kekuasaan yang hegemonik misalnya, pada dasarnya menyebabkan seseorang tidak memerlukan informasi faktual, sebab keputusan-keputusannya dapat dijalankan secara instruksional bersifat paksaan (*coercion*).

(4)

Era Orde Baru ditandai oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik dan korporatis ala fasisme. Seluruh hubungan institusional secara vertikal berdasarkan pola pusat dan periferi, dengan pelumpuhan daya periferi. Dalam politik misalnya dijalankan prinsip massa mengambang, sehingga peran politik dijalankan secara elitis, dan elit politik dikendalikan secara sentralistik dan bersifat *top-down*. Di satu pihak informasi bagi elit sosial disediakan secara tertutup dalam institusi masing-masing yang sudah terkooptasi dalam sistem negara korporatis. Pada pihak lain, informasi faktual media massa difilter untuk kepentingan penguasa negara. Dengan begitu sebenarnya fungsi pragmatis media massa bagi elit ini tidak dirasakan perlunya, sebab dalam menjalankan peran sosialnya, cukup menunggu instruksi dari atasan masing-masing. Pengurus komcat (komisaris kecamatan) organisasi politik misalnya, menerima pesan dari pengurus lebih tinggi; pengurus ormas idem, bahkan Menteri selalu menunggu petunjuk Bapak Presiden.

Setelah Era Reformasi, diharapkan struktur yang bersifat hegemonik dan korporatis sudah hilang, digantikan dengan struktur demokratis. Demokrasi mengandung makna independensi dan otonomi dari berbagai institusi sosial dalam kehidupan negara. Dengan kata lain, negara disangga oleh berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Setiap ketergantungan antar institusi ini dilandasi oleh proses negosiasi sosial. Setiap institusi sosial pada dasarnya digerakkan oleh warga masyarakat yang memiliki peran di dalamnya. Peran sosial seseorang dapat dilihat dalam proses negosiasi ini dalam mencapai konsensus sebagai landasan setiap kerjasama. Kehidupan negara dalam prinsip otonomi daerah ditandai dengan negosiasi elit yang menjalankan institusi negara pada tingkat pusat, dengan elit dari institusi-institusi pada tingkat daerah. Hasil dari daerah misalnya, tidak dapat secara sepahak dan sewenang-wenang disedot ke pusat oleh BAPPENAS dan departemen kabinet regim negara yang bercokol di pusat. Dari sini pula dorongan bagi prinsip akuntabilitas sosial (*social accountability*) dalam kehidupan negara, sebab negosiasi hanya dapat berlangsung dalam kondisi saling mempercayai. Faktor kredibilitas menjadi prasyarat bagi setiap elit yang terlibat dalam proses sosial.

(5)

Jika diringkas, seluruh proses sosial dalam tataran demokratis adalah negosiasi sosial, akuntabilitas setiap institusi negara, dan kredibilitas personal setiap elit sosial dalam

kehidupan negara. Dalam latar semacam inilah kehadiran media pers (media jurnalisme) merupakan *conditio sine qua non*. Seluruh proses sosial dalam kehidupan negara hanya akan dapat berjalan jika disangga oleh kehadiran media jurnalisme yang menyediakan informasi faktual yang relevan dalam kehidupan sosial. Tetapi tentunya hanya media pers bebas dan memiliki otonomi yang dapat berfungsi dalam kondisi ini. Pers Pembangunan ala Orde Baru dengan sendirinya tidak punya tempat, bahkan akan menganggu dalam proses negosiasi sosial. Pers dituntut untuk mampu menyampaikan fakta sosial secara obyektif, sehingga harus dapat dibedakan dengan tegas antara media pers sebagai institusi sosial dengan media pers yang menjalankan fungsi partisan. Informasi sepihak pada dasarnya bersifat instruksional, tidak dapat membuka kemampuan personal dalam menilai fakta sosial. Informasi faktual menjadi bahan baku bagi setiap elit sosial dalam menentukan posisi dalam proses negosiasi sosial.

Di satu pihak kehidupan demokrasi menuntut kredibilitas elit yang memiliki peran sosial. Pada pihak lain, menjadi tuntutan yang mutlak kredibilitas media pers/jurnalisme. Tanpa kredibilitas dari elit sosial dan media pers, seluruh proses sosial akan terganggu. Dengan demikian, media pers perlu “mengintai” *track record* setiap elit untuk menilai kredibilitasnya. Transparansi dari kehidupan publik dan moralitas elit menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penilaian atas kredibilitas. Hal yang sama juga berlaku dalam menilai keberadaan media jurnalisme. Pengawasan media (*media watch*) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan untuk menilai kredibilitas media jurnalisme.

(6)

Era Reformasi diharapkan akan mengubah konfigurasi masyarakat sekaligus kualitas personal elit sosial. Secara makro, otonomi daerah akan menggerakkan berbagai institusi sosial yang ada di suatu wilayah. Tumbuh dan berkembangnya institusi sosial yang memiliki independensi dan otonomi akan memunculkan elit sosial dalam peran institusionalnya masing-masing. Lingkup dan skala perannya akan menentukan tingkat negosiasi sosial yang harus dijalankannya. Pada situasi ini dia akan memerlukan informasi faktual yang relevan dan obyektif.

Dasar pemikiran ini dapat dijadikan titik tolak dalam melihat kehadiran media jurnalisme yang berlingkup komunitas terbatas (*community newspaper*). Ada dua macam media komunitas, masing-masing berkaitan dengan dua tipe kehidupan komunitas yaitu privat dan publik. Pertama, media yang menjadi subsitusi bagi komunikasi sosial. Media semacam ini dibikin untuk warga komunitas yang tidak punya waktu untuk aktif dalam pergaulan sosial yang bersifat langsung, karenanya tidak dapat terlibat dalam komunikasi sosial dengan sesama warga. Isinya lebih banyak tentang kehidupan privat yang relevan dalam komunitas. Kedua, sebagai media yang menyangga kehidupan komunitas dalam sektor publik, sebagai acuan bagi elit sosial dalam kehidupan publik.

(7)

Keberadaan media komunitas dapat dilihat dalam fungsi pragmatisnya bagi khalayak. Untuk menghadirkan media komunitas yang menyangga kehidupan publik, menuntut pengelolanya harus dapat membaca karakteristik warga komunitas yang memiliki peran publik. Pendekatan ceruk (*niche*) dalam bisnis media menjadi lebih tajam, dengan pengidentifikasi lingkup geografis, sekaligus kecenderungan sosiografis dan psikografis komunitas yang menjadi sasaran media. Dengan begitu media komunitas akan bersumber dari, dan berorientasi kepada komunitas yang menjadi khalayaknya.

Media lokal yang hanya menjadi perpanjangan dari informasi dari luar komunitas tidak dapat disebut sebagai suratkabar komunitas. Dari sini dapat dibayangkan bahwa media komunitas tidak bersaing dengan media dengan orientasi nasional. Sebab fungsi pragmatis media komunitas berbeda dengan media nasional.

Kehadiran suratkabar komunitas dapat dijadikan indikator dari dinamika kehidupan lokal. Berbagai kegiatan institusi sosial dalam kehidupan publik akan muncul dalam media komunitas. Otomatis warga akan memerlukan media komunitas. Masalahnya, apakah dinamika masyarakat lokal sudah bergerak setelah Era Reformasi? Kalau alam pikiran warga masih masih didominasi dengan peristiwa-peristiwa di pusat, sementara kehidupan publik pada tingkat lokal belum cukup dinamis dalam otonominya, kehadiran media komunitas belum menjadi kebutuhan langsung warga masyarakat.